

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Agile government merupakan konsep tata kelola yang melihat kemampuan organisasi untuk merespon secara cepat perubahan yang tak terduga dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berubah-ubah (Marifah & Satlita, 2023). Konsep tersebut hadir untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam memanfaatkan teknologi informasi komunikasi. Oleh karena itu, tata kelola pemerintahan yang gesit menjadi keharusan bagi negara dalam menghadapi krisis eksistensi di era disrupsi ini (Vernanda, 2020). Maka pelayanan publik harus terus melakukan terobosan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan melakukan perbaikan secara berkala, berdasarkan hasil evaluasi dari komentar dan saran yang diberikan oleh masyarakat.

Di era digital sekarang ini, efisiensi dan responsivitas dalam pelayanan publik menjadi kriteria penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (Adnan, 2014). Berdasarkan data pengguna internet di Indonesia pada tahun 2023, terdapat 221.563.479 pengguna dari total populasi 278.696.200 jiwa (Busri et al., 2023). Hal ini secara tidak langsung menuntut pemerintah untuk menyediakan layanan yang mudah digunakan, transparan, responsif, epektif dan efisien (Adnan, 2014). Layanan digital yang menjadi kebutuhan masyarakat bukan hanya layanan administrasi dan kesehatan, namun juga kepengurusan perizinan bangunan.

Secara umum, proses pembuatan izin bangunan di Indonesia sering kali dihadapkan pada birokrasi yang rumit dan memakan waktu, serta biaya yang besar bagi masyarakat (Online, 2020). Hal ini menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan perizinan dan menghambat perkembangan infrastruktur di suatu wilayah. Kesulitan dalam mengurus izin bangunan juga mengakibatkan banyaknya kasus bangunan ilegal yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota di Indonesia, seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 1Data Sebaran Kasus Bangunan Ilegal Kabupaten/Kota

Pulau	Jumlah Kasus/ Kota
Sumatera	38
Jawa-Bali	25
Kalimantan	15
Sulawesi	18
Nusa Tenggara	10
Maluku dan Papua	15

Sumber: Kementerian ATR/BPN, (2021)

Permasalahan bangunan ilegal juga menjadi masalah besar di kota metropolitan seperti Jakarta. Sekitar 60% orang Jakarta masih tinggal di wilayah yang tidak layak huni. Mereka sering mendirikan bangunan ilegal di tempat-tempat yang berisiko, seperti di bawah jalan tol, di bawah jembatan, bahkan di pinggiran sungai. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk kota Jakarta masih kesulitan mendapatkan hunian yang layak (Risbiani Fardaniah, 2021). Permasalahan tersebut

juga terjadi di kota-kota non metropolitan di sumatra, khususnya kota sumatra bagian selatan (SUMBANGSEL), yaitu kota jambi. Dimana didapati banyak kasus pelanggaran izin bangunan, termasuk RS Rimbo Medika (Khairiyyah & Amir, 2022). Dari kasus pelanggaran diatas, tentu saja akan berdampak kepada masyarakat banyak, Yang seharusnya pendirian bangunan disesuaikan dengan berbagai pertimbangan dan perizinan sehingga tidak menyulitkan masyarakat.

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan inisiatif pemerintah untuk menyederhanakan proses perizinan serta mencegah terjadinya pelanggaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Persetujuan Bangunan Gedung, yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Di Kota Jambi, tanggung jawab atas pelayanan perizinan, terutama terkait bangunan gedung, berada di bawah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Dalam pelaksanaannya, DPMPTSP melakukan kolaborasi dengan DPUPR melalui Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian, khususnya Seksi Monitoring dan Evaluasi Jasa Konstruksi, yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis terkait Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha Jasa Konstruksi dalam proses pengurusan PBG (Octari Anggraini, 2023).

Meskipun Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) telah diimplementasikan, terdapat sejumlah tantangan signifikan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di lapangan, terutama oleh para pengurus perizinan. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh anggota Real Estate Indonesia (REI), yang menyatakan bahwa transisi dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke PBG sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Cipta Kerja belum sepenuhnya berjalan mulus di tingkat daerah. Beberapa daerah masih mengalami kekakuan dan kebingungan dalam penerapan aspek teknis PBG. Kekhawatiran ini timbul mengingat kebutuhan pembangunan yang tetap tinggi, namun proses perizinan yang belum optimal menghambat ketersediaan pasokan. Meskipun sistem *Online Single Submission* (OSS) yang diterapkan telah berfungsi dengan baik, kesiapan pihak-pihak terkait masih perlu ditingkatkan untuk mencapai implementasi yang lebih efektif (Jambiprima.com, 2022).

Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber berita antara 30 Juli 2021 hingga Desember 2022, terdapat 509 permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Jambi, namun hanya 155 izin yang diterbitkan (Berliandy Haposan Manik, 2023). Menurut Standar Operasional Prosedur (SOP), PBG seharusnya diterbitkan dalam 28 hari kerja setelah pendaftaran hingga sertifikat izin dikeluarkan (Pupr, 2021). Fakta ini menunjukkan adanya kendala dan ketidakefisienan dalam proses penerbitan PBG, yang mengisyaratkan perlunya peningkatan kolaborasi antara instansi. Dengan fokus pada pendekatan *agile*

government diharapkan mampu mempercepat dan meningkatkan efektivitas proses perizinan, sekaligus mengurangi hambatan birokrasi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kota Jambi.

Studi ini mengacu pada riset terdahulu sebagai dasar perbandingan, dengan tujuan memastikan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar baru dan belum pernah dieksplorasi. Langkah ini penting agar studi ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, diperlukan tinjauan terhadap karya-karya sebelumnya untuk mengidentifikasi adanya keterkaitan, persamaan, atau perbedaan dengan topik yang diangkat. Berikut adalah beberapa karya terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian ini:

Agile Government digambarkan sebagai inovasi dalam tata kelola yang mencakup kombinasi adaptasi budaya, struktural, dan prosedural, yang dirancang untuk membuat organisasi publik lebih tanggap terhadap perubahan lingkungan. Pemerintahan yang gesit ini didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah untuk menghadapi situasi yang sangat tidak stabil, tidak pasti, dan sulit diprediksi, serta menekankan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat. Beberapa penulis menekankan bahwa konsep *Agile Government* memungkinkan pemerintah untuk merespons perubahan dengan cepat dalam konteks yang semakin

kompleks dan digital. Pendekatan ini juga memungkinkan tata kelola pemerintahan untuk beradaptasi secara efisien dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan dinamika lingkungan (Deseve, 2020; Greve et al., 2020; McBride et al., 2022; Neumann et al., 2024; Zulyani, 2020).

Konsep ini merupakan bagian dari tata kelola adaptif, yang melibatkan pengambilan keputusan terdesentralisasi serta pemanfaatan kemampuan internal dan eksternal. Lebih lanjut, konsep ini dijelaskan sebagai strategi untuk meningkatkan kemampuan adaptasi pemerintah terhadap perubahan di lingkungan internal dan eksternal, dengan fokus pada budaya organisasi, kolaborasi, dan adaptabilitas yang lebih tinggi. Kemudian juga didefinisikan sebagai pendekatan yang berfokus pada pelanggan dan didorong oleh komunikasi serta kolaborasi (Carrasco et al., 2018; Mergel et al., 2018; Soe & Drechsler, 2018). Di sisi lain, konsep ini didefinisikan sebagai pendekatan yang agile dan lean dengan kemampuan untuk menciptakan nilai yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah dalam layanan publik (Nurhidayanti et al., 2023). Agile government dipandang sebagai kebutuhan mendesak untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh inovasi disruptif dan perubahan sosial yang cepat (Kumorotomo, 2020).

Berdasarkan literatur review yang telah penulis kumpulkan, dari penelitian ini ditemukan bahwa kemampuan sebuah birokrasi merespons isu-isu terkini dan penerapan teknologi dalam layanan publik sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, terutama jika didukung oleh partisipasi aktif masyarakat. Meskipun birokrasi pada umumnya sudah memiliki elemen-elemen agile, masih terdapat hambatan berupa resistensi dari struktur birokrasi dan keterbatasan sumber daya. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dan kolaboratif dalam administrasi publik, serta kepemimpinan yang mendorong penerapan prinsip-prinsip *agile government*. Peneliti juga menyoroti perlunya pengembangan perangkat lunak yang mendukung manajemen proyek *agile* di bidang aplikasi yang relevan untuk mencapai hasil yang optimal. Namun, kurangnya evaluasi terhadap metrik yang ada menunjukkan bahwa penelitian perlu lebih memahami konteks dan kebutuhan spesifik dalam administrasi publik. Untuk mengatasi masalah yang ditemukan, penelitian ini banyak menggunakan metode studi kasus, wawancara, dan penelitian tindakan.

Agile Governance didefinisikan sebagai kemampuan suatu organisasi dalam pelayanan harus beradaptasi di era distrubsi ini, dengan berinovasi agar memberikan efisiensi pelayanan. Selanjutnya

didefinisikan sebagai kemampuan suatu organisasi untuk merespons dengan cepat terhadap perubahan yang tidak terduga /atau dinamis, dalam memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang semakin berubah (Busri et al., 2023; Rofiyanti et al., 2021). konsep ini menurut peneliti didefinisikan sebagai kerangka kerja yang memungkinkan organisasi, untuk secara efektif mengelola praktik keberlanjutan, sambil mendorong kolaborasi dan respons terhadap perubahan pasar (Soundararajan et al., 2021). Dari pendapat lain mendeskripsikan bahwa konsep tersebut merupakan pendekatan dalam pengelolaan dan pengendalian sumber daya IT (*Information Tehcnology*) yang mengadopsi prinsip-prinsip responsifitas, fleksibilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan proyek dan proses IT organisasi publik dan pemerintahan (Lima et al., 2017). Sedangkan dari peneliti ini menyebutkan sebagai akuntabilitas dan tanggung jawab manajemen dalam mengadopsi metode pengembangan perangkat lunak *agile*, serta memiliki tujuan untuk memastikan oragisasi dapat memastikan strategi dan tujuan bisnis mereka efektif (Poligadu & Moloo, 2014).

Penelitian sebelumnya mengungkapkan beberapa temuan penting terkait *Agile Governance*. Salah satu hambatan utama adalah kurang optimalnya koordinasi antarinstansi. Meskipun sudah diterapkan sanksi untuk kinerja yang tidak memadai, efektivitasnya

masih perlu ditingkatkan. Selain itu, terdapat kendala signifikan seperti birokrasi yang rumit, keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dalam teknologi informasi, dan fasilitas yang kurang memadai. Tantangan lain termasuk rendahnya minat masyarakat dan sosialisasi yang terbatas, serta belum maksimalnya penggunaan indikator dalam analisis *Strengths Weaknesses Opportunities Threats*.

Agile Organization didefinisikan sebagai suatu pendekatan organisasi yang menekankan fleksibilitas, kolaborasi, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Selanjutnya mengemukakan bahwa organisasi yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Adapun pendapat lain mengatakan organisasi yang dapat mengelola ketidakpastian dan kompleksitas dengan cara yang fleksibel, serta menciptakan keunggulan kompetitif melalui struktur organisasi, sistem informasi, dan proses logistik yang responsif. Adapun pendapat lain mengatakan suatu pendekatan dalam manajemen dan struktur organisasi yang menekankan fleksibilitas, kolaborasi, dan respon cepat terhadap perubahan. Selanjutnya penelitian lain mendefinisikan sebagai pendekatan manajemen dan struktur organisasi yang menekankan kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan lingkungan, kebutuhan pasar, dan permintaan pelanggan

(Adhikersa et al., 2022; Car- Pušić et al., 2019; Dühring & Zerfass, 2021; Pantouvakis & Bouranta, 2017; Rulinawaty et al., 2020).

Agile Organization Dalam penerapannya terdapat sejumlah tantangan telah diidentifikasi, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, kekakuan budaya organisasi, kendala hukum dan finansial, serta kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan kondisi. Selain itu, keterbatasan literatur, inerti sistem, dan resistensi terhadap perubahan juga menjadi hambatan yang berarti dalam mengimplementasikan konsep ini. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan yang adaptif, komunikasi yang efektif, manajemen sumber daya manusia yang optimal, serta integrasi yang kuat antar elemen organisasi dapat membantu mengatasi tantangan-tantangan ini. Dukungan budaya organisasi, hubungan baik antarinstansi, peningkatan kinerja organisasi, dan kolaborasi yang solid merupakan kunci keberhasilan dalam implementasi.

Agile Management didefinisikan sebagai pendekatan manajemen yang menekankan fleksibilitas, kolaborasi, dan kemampuan untuk merespons perubahan dengan cepat, serta melihat proses dalam jangka pendek (*sprint*), di mana masyarakat turut berpartisipasi dalam siklus perubahan sesuai kebutuhan pelanggan. Selanjutnya didefinisikan bahwa pendekatan dalam manajemen

yang menekankan fleksibilitas, kolaborasi, dan respons cepat terhadap perubahan. Selain itu, konsep ini juga didefinisikan sebagai pendekatan pengembangan produk yang berfokus pada fleksibilitas, kolaborasi, dan respons cepat terhadap perubahan. Peneliti lain menambahkan bahwa pendekatan ini menekankan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dan meningkatkan kolaborasi di antara anggota organisasi. Dalam konteks teknologi informasi dan layanan digital, juga dilihat sebagai pendekatan yang menekankan fleksibilitas, kolaborasi, dan respons cepat terhadap perubahan dalam pengembangan proyek (Batt et al., 2021; de Borja et al., 2019; Kohnová et al., 2023; Mergel, 2016; Mergel et al., 2021; Orsdemir et al., 2019).

Agile Management Berbagai temuan dari penelitian terkait manajemen *agile* menyoroti beberapa aspek penting, di antaranya adalah pentingnya membangun budaya organisasi yang mendukung, kolaborasi antar organisasi yang memiliki manajemen gesit dan responsif terhadap perubahan kebutuhan pasar, kesadaran informasi yang tinggi, persiapan yang matang, serta peningkatan perangkat lunak. Selain itu, temuan-temuan tersebut juga mengungkap bagaimana pandemi *Corona Virus Disease -19* telah mempengaruhi dan mengubah dinamika birokrasi, menuntut adaptasi dan inovasi dalam proses manajemen dan operasional organisasi.

Tabel 1. 2 Comparative Review Literatur Review

Penelitian	Fokus Utama	Temuan	Kelemahan
Untangling Agile Government	Pentingnya struktur dan stabilitas untuk mendukung agility dalam pemerintahan.	Pemerintah memiliki elemen agility secara default, namun implementasi prinsip agile berisiko jika tidak tepat.	Tidak membahas secara rinci bagaimana struktur dan stabilitas dapat mendukung kolaborasi lintas sektor secara efektif.
Agile Bureaucracy in the Digital Age	Evaluasi penerapan digitalisasi layanan publik di Jambi.	Agile Bureaucracy meningkatkan efisiensi dan responsivitas, tetapi ada tantangan adaptasi teknologi di kalangan pegawai.	Tidak menggunakan data dari masyarakat, sehingga perspektif masyarakat dalam kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat tidak dieksplorasi.
Agile Governance As a Form of Public Service Transformation	Penerapan teknologi dalam pelayanan publik dan tantangan kolaborasi dengan	Kurangnya sosialisasi aplikasi IT menyebabkan kurangnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, menghambat pemanfaatan layanan.	Tidak memberikan langkah konkret untuk meningkatkan kolaborasi pemerintah-masyarakat,

	masyarakat.		yang menjadi hambatan utama dalam penerapan Agile Governance.
Agile Government dalam Mewujudkan Birokrasi yang Berkelas Dunia	Implementasi Agile Government dalam meningkatkan responsivitas dan inovasi layanan publik.	Agile meningkatkan kolaborasi antarunit dan memperkuat akuntabilitas/transparansi melalui pelibatan masyarakat.	Resistensi terhadap perubahan budaya birokrasi menjadi tantangan dalam menciptakan kolaborasi lintas unit dan dengan masyarakat.

Dalam penelitian ini, peneliti akan memanfaatkan konsep *agile government* sebagai kerangka utama. Merujuk pada penerapan prinsip-prinsip *agile* dalam keseluruhan konteks pemerintahan, yang melibatkan perubahan dalam budaya, struktur, dan proses organisasi publik agar lebih responsif, fleksibel, dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. Dengan menekankan inovasi dalam pengelolaan publik, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepuasan pengguna layanan. Pendekatan ini menekankan pentingnya kemampuan pemerintah untuk dengan cepat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan masyarakat dan lingkungan yang terus

berkembang, sehingga dapat memberikan layanan yang lebih relevan dan tepat waktu.

Berdasarkan penelitian yang ada, telah banyak mengidentifikasi berbagai tantangan dalam implementasi *agile government*, seperti resistensi terhadap perubahan, dan keterbatasan sumber daya manusia. Namun, terdapat kekurangan dalam penelitian yang secara spesifik mengkaji kolaborasi dalam proses pelayanan persetujuan bangunan gedung menggunakan prinsip-prinsip *agile government*, terutama dalam konteks pemerintahan Kota Jambi. Padahal, kolaborasi merupakan elemen yang sangat penting dalam prinsip agile karena memungkinkan fleksibilitas, responsivitas, dan sinergi lintas sektor dan antar instansi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada birokrasi secara umum dan belum mendalami bagaimana kolaborasi ini dapat diterapkan secara efektif dalam pemerintahan lokal, khususnya dalam konteks proses pelayanan persetujuan bangunan gedung.

Konsep Agile Government dalam penelitian ini menekankan pentingnya fleksibilitas, responsivitas, dan inovasi dalam pelayanan publik, terutama dalam proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Jambi. Salah satu aspek utama dalam Agile Government menurut Butler (2011) adalah kolaborasi, yang mencakup integrasi proses kerja, komunikasi antarinstansi, dan mekanisme dukungan. Dalam layanan PBG, kolaborasi antara DPUPR dan DPMPTSP berperan penting dalam menciptakan proses perizinan yang lebih cepat dan terintegrasi. Hubungan antara

Agile Government dan kolaborasi terlihat dari bagaimana kerja sama yang baik dapat membantu penyesuaian regulasi secara fleksibel, mempercepat penerapan sistem digital dalam perizinan, meningkatkan koordinasi antarinstansi, serta memastikan evaluasi layanan berbasis data. Dengan demikian, kolaborasi bukan hanya bagian dari Agile Government, tetapi juga mencakup seluruh indikator utama dalam teori Butler. Hal ini menjadikannya strategi penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih cepat, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Dalam proses pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Jambi, masalah utama yang dihadapi adalah lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin. Proses yang kompleks sering disebabkan oleh kurangnya kolaborasi yang efektif antara berbagai instansi terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Ketidakefisienan ini tidak hanya memperlambat proses, tetapi juga menghambat upaya untuk meningkatkan pelayanan publik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kolaborasi antar instansi, dengan harapan menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, fleksibel, dan efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam konteks persetujuan bangunan gedung. Penelitian ini berjudul **“AGILE IN LOCAL GOVERNMENT: KOLABORASI DALAM PROSES PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DI KOTA JAMBI”**.

1.2 Rumusan Masalah

Proses perizinan PBG menghadapi kendala berupa lamanya waktu pemrosesan, yang disebabkan oleh kurangnya efektivitas kolaborasi antara instansi terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Ketidak efisienan ini berdampak pada peningkatan waktu penerbitan izin dan penurunan tingkat kepuasan masyarakat serta pemangku kepentingan. Berdasarkan masalah penelitian yang ada, berikut merupakan pertanyaan penelitian: Bagaimana penerapan prinsip kolaborasi dapat memperbaiki interaksi antar instansi terhadap proses pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan utama dalam kolaborasi antarinstansi dan mencari solusi yang dapat meningkatkan kecepatan serta efisiensi proses pelayanan PBG di Kota Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu batu loncatan bagi pengembangan ilmu pemerintahan, dikhususkan terkait akuntabilitas yang mana merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang ada serta dapat dijadikan bahan bacaan dan evaluasi untuk instansi atau lembaga terkait yang memberikan layanan kepada masyarakat agar dapat memperbaiki kualitas layanan yang berbasis kebutuhan masyarakat.

1.5 Landasan Teori

Dalam rangka memperkuat masalah yang telah dijelaskan diatas, maka penulis menggunakan teori-teori yang mana nantinya memperkuat dan menjadi bahan acuan penelitian, yaitu:

1.5.1 Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut sondang siagian dalam (Inu Kencana Syafiie, 2013) ilmu merupakan suatu objek ilmiah yang terdiri dari kumpulan prinsip, dalil, dan rumus yang telah diuji kebenarannya melalui eksperimen sistematis yang

dilakukan secara berulang. Prinsip-prinsip, dalil-dalil, dan rumus-rumus tersebut dapat diajarkan dan dipelajari.

Secara epistemologi, "perintah" merujuk pada tindakan menyuruh atau memberi instruksi, yang melibatkan dua pihak: "rakyat" dan "pemerintah," yang memiliki hubungan timbal balik. Ketika ditambahkan awalan "me-" menjadi "pemerintah," istilah ini merujuk pada badan atau organisasi yang memberikan perintah. Selanjutnya, dengan penambahan akhiran "-an" menjadi "pemerintahan," maknanya berubah menjadi tindakan, metode, atau segala hal yang berkaitan dengan proses atau pelaksanaan perintah oleh pemerintah (Inu Kencana Syafiie, 2013). Kemudian banyak dinarasikan oleh berbagai peneliti sehingga pengertian Ilmu Pemerintahan, dapat diartikan seperti yang disampaikan oleh beberapa ahli, diantaranya:

David Easton dalam (Hodge & Greve, 2017) mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai studi tentang sistem politik yang mencakup interaksi antara berbagai elemen dalam masyarakat, termasuk individu, kelompok, dan institusi. Dalam pendapat H. A. Brasz, ilmu pemerintahan merupakan cara mempelajari suatu cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan secara baik ke dalam maupun ke luar terhadap warganya (Inu Kencana Syafiie, 2013).

Berdasarkan pernyataan ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa ilmu pemerintahan berfungsi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari cara mengkoordinasikan dan memimpin bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif, baik dalam konteks hubungan antara pusat dan daerah, antar lembaga, maupun antara pemerintah dan masyarakat yang dipimpin. Tujuannya adalah memastikan pelaksanaan pemerintahan yang efektif, tepat, dan sesuai prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam menghadapi berbagai fenomena dan dinamika pemerintahan.

1.5.2 Agile Government

Agile adalah sekumpulan metode yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak, di mana prosesnya dilakukan secara iteratif dengan aturan dan solusi yang telah disetujui serta disepakati oleh tim yang terstruktur dan terorganisir (Sutiono, 2022). Definisi peneliti lain mengemukakan bahwa sebuah kemampuan suatu organisasi untuk merespons dan beradaptasi dengan cepat dan berkelanjutan terhadap perubahan (Wasistiono & Anggraini, 2019). Hal ini dicapai melalui penggabungan tata kelola yang efektif dan kemampuan *agile* yang berkolaborasi, dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah yang baik, cepat, dan efisien dalam proses pengembangan di seluruh struktur organisasi. Konsep ini telah didefinisikan melalui berbagai pendekatan yang berbeda,

sehingga penulis mengumpulkan berbagai paradigma dari para peneliti yang membahas konsep tersebut.

“*Agile Governance* dalam pemerintahan mengacu pada kemampuan masyarakat untuk dengan cepat dan terus-menerus merasakan, beradaptasi, dan merespons perubahan di lingkungan mereka. Ini dicapai melalui kombinasi yang berkolaborasi antara prinsip-prinsip agile dan lean dengan tata kelola yang baik, yang bertujuan untuk memberikan nilai lebih cepat, lebih baik, dan lebih efisien kepada bisnis inti mereka (Luna et al., 2020).”

Dalam praktiknya, *Agile Governance* didukung oleh beberapa indikator utama, termasuk tata kelola yang memadai, pendekatan yang berbasis bisnis, fokus pada manusia, pencapaian hasil yang cepat, pendekatan yang sistematis dan adaptif, serta desain yang sederhana dan berkelanjutan.

“*Agile Government* merupakan kerangka kerja yang dirancang untuk meningkatkan responsivitas dan adaptabilitas lembaga pemerintah melalui penerapan prinsip-prinsip kelincahan (Butler, 2011).” Dalam penerapannya, *Agile Government* menekankan pentingnya adaptabilitas, kolaborasi, integrasi teknologi, dan mekanisme umpan balik sebagai elemen utama dalam menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan efektif.

“*Agile organisasi* adalah sebuah konsep yang menggambarkan kemampuan organisasi untuk dengan cepat beradaptasi terhadap perubahan, dengan fokus pada kolaborasi dan interaksi tim (Owen et al., 2006).” Dalam praktiknya, organisasi agile mengedepankan responsivitas, pengambilan keputusan yang didasarkan pada data, proses interaktif yang berorientasi pada hasil, serta berupaya menjadi organisasi yang terus belajar dan berkembang.

“*Agile manajemen* merupakan penerapan prinsip-prinsip manajemen yang menekankan pentingnya fleksibilitas, kolaborasi, dan kemampuan merespons perubahan secara efektif (Cooper & Sommer, 2016).” Prinsip-prinsip ini tercermin dalam pendekatan yang fleksibel, kerjasama tim yang solid, iterasi berkesinambungan dengan umpan balik, pemberdayaan tim untuk membuat keputusan, serta fokus utama pada nilai yang dihasilkan untuk pelanggan.

Maka dari keempat konsep *agile* diatas dapat disimpulkan sebagai konsep-konsep yang memiliki tujuan utama yang sama: meningkatkan adaptabilitas, responsivitas, dan efisiensi dalam berbagai konteks, termasuk pemerintahan, organisasi, dan manajemen. Keempat konsep ini menekankan pentingnya fleksibilitas, kolaborasi, serta kemampuan untuk cepat beradaptasi terhadap perubahan. Hal ini dapat dicapai melalui pendekatan yang sistematis, berbasis data, atau melalui pemberdayaan tim dan integrasi teknologi.

Secara lebih spesifik, Konsep *governance* berfokus pada kemampuan masyarakat dan organisasi untuk merespons perubahan melalui tata kelola yang baik. Sedangkan *Government* diterapkan dalam birokrasi pemerintahan, dengan penekanan pada integrasi teknologi, Kolaborasi antar instansi dan mekanisme umpan balik. Selanjutnya Organisasi lebih menekankan adaptabilitas organisasi yang cepat, dengan fokus pada kolaborasi dan interaksi tim. Terakhir konsep manajemen menekankan fleksibilitas dalam pendekatan manajerial dan pemberdayaan tim untuk mencapai hasil yang optimal.

Berdasarkan keempat konsep agile tersebut, peneliti memutuskan untuk menggunakan *Agile Government*. Pilihan ini diambil karena konsep ini secara langsung berfokus pada peningkatan kolaborasi antar instansi dan responsivitas dalam lembaga pemerintah. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada peningkatan layanan publik dan efisiensi birokrasi. Peneliti akan menyelidiki bagaimana penerapannya agar dapat memperbaiki proses birokrasi. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mentransformasi layanan dan meningkatkan kinerja pemerintah dengan pendekatan yang lebih adaptif dan responsif.

Teori *Agile Government* yang digunakan dalam penelitian ini juga memiliki relevansi yang kuat dengan ilmu pemerintahan, terutama dalam konteks peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. *Agile Government* berfokus pada kemampuan organisasi pemerintah untuk merespons dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan masyarakat dan

lingkungan, yang merupakan prinsip dasar dalam ilmu pemerintahan. Dalam konteks ini, teori ini menekankan pentingnya kolaborasi antar instansi, fleksibilitas, dan responsivitas dalam pengambilan keputusan dan penyampaian layanan publik.

Agile Government Adalah kerangka kerja yang berupaya meningkatkan daya tanggap dan kemampuan beradaptasi lembaga pemerintah dengan memasukkan prinsip-prinsip kelincahan (Butler, 2011).

1.5.2.1 Adaptabilitas

Adaptabilitas merujuk pada kemampuan suatu organisasi atau sistem untuk dengan cepat dan efektif beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan dan kondisi lingkungan. Hal ini berarti kemampuan pemerintah untuk menyesuaikan proses dan struktur mereka dengan cepat agar tetap relevan dan responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi yang terus berubah. Mencakup fleksibilitas dalam kebijakan, prosedur, dan cara kerja agar dapat menghadapi tantangan baru dan kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.

1.5.2.2 Kolaborasi

Kolaborasi mencakup upaya bersama antara berbagai instansi, tim, atau individu untuk mencapai tujuan bersama (Butler, 2011). Dalam perspektif *agile government*, kolaborasi adalah kunci untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pemerintahan. Ini melibatkan kerja sama yang erat antara

berbagai lembaga pemerintah, serta antara pemerintah dan masyarakat, untuk memecahkan masalah secara kolektif, berbagi informasi, dan menyelaraskan usaha-usaha untuk mencapai hasil yang optimal.

Konsep *agile government* dalam penelitian ini menekankan pentingnya fleksibilitas, responsivitas, dan inovasi dalam pelayanan publik, terutama dalam proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Jambi. Salah satu aspek utama dalam *Agile Government* menurut (Butler, 2011) adalah kolaborasi, yang mencakup integrasi proses kerja, komunikasi antarinstansi, dan mekanisme dukungan. Dalam konteks pelayanan PBG, kolaborasi antara DPUPR dan DPMPTSP berperan penting dalam menciptakan proses perizinan yang lebih cepat dan terintegrasi. Kolaborasi yang efektif memungkinkan penyesuaian regulasi yang lebih fleksibel, mempercepat penerapan sistem digital, meningkatkan koordinasi antarinstansi, serta memastikan evaluasi layanan berbasis data. Dengan kata lain, kolaborasi bukan hanya elemen pendukung, tetapi juga mencakup seluruh indikator utama. Hal ini menjadikannya strategi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih adaptif tanpa mengorbankan aspek lain dalam *agile government*, seperti inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Namun, dalam praktiknya, kurangnya kolaborasi yang efektif justru menjadi hambatan utama dalam proses pelayanan PBG di Kota Jambi. Proses perizinan yang kompleks dan berbelit sering kali terjadi akibat kurangnya

koordinasi yang optimal antara DPUPR dan DPMPTSP, yang menyebabkan waktu penyelesaian izin menjadi lebih lama. Ketidakefisienan ini tidak hanya memperlambat pelayanan publik, tetapi juga menghambat penerapan penuh prinsip Agile Government yang bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, fleksibel, dan inovatif. Oleh karena itu, memperkuat kolaborasi antarinstansi bukan hanya solusi untuk mempercepat proses perizinan, tetapi juga menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa seluruh indikator *Agile Government* dapat diimplementasikan secara optimal tanpa saling bertentangan (Awamleh et al., 2022).

a. Integrasi Proses Kerja

Mencakup sejauh mana instansi terkait, seperti DPUPR dan DPMPTSP, mampu menyelaraskan dan menyesuaikan prosedur mereka secara cepat tanpa mengorbankan fleksibilitas. Selain itu, penggunaan teknologi bersama untuk memfasilitasi koordinasi dan mengurangi tumpang tindih dalam proses perizinan merupakan faktor penting dalam memastikan efisiensi operasional. Kemampuan instansi dalam beradaptasi dengan perubahan kebijakan dan regulasi juga menjadi indikator utama dalam mengukur tingkat responsivitas terhadap dinamika lingkungan eksternal.

b. Komunikasi Antar Instansi

Meliputi kejelasan dalam penyampaian informasi antar instansi, di mana pemahaman yang seragam mengenai prosedur dan tanggung jawab masing-masing instansi dapat meminimalisasi potensi mispersepsi. Efektivitas saluran komunikasi, baik melalui platform digital maupun koordinasi langsung, menjadi kunci dalam memastikan informasi tersampaikan secara real-time dan tepat sasaran. Selain itu, keberadaan mekanisme umpan balik yang efektif, baik antara instansi maupun dari pihak pemohon izin, sangat penting untuk memastikan perbaikan berkelanjutan dalam proses perizinan.

c. Mekanisme Dukungan

Mencakup ketersediaan alat kolaborasi berbasis teknologi, seperti platform *e-government*, yang mendukung transparansi dan efisiensi lintas instansi. Adanya perjanjian kerjasama formal yang mendefinisikan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak juga penting dalam menjaga koordinasi yang baik. Dukungan administratif yang memadai menjadi faktor pendukung keberlanjutan kolaborasi, memungkinkan kelancaran proses kerja dan tanggung jawab yang terdistribusi secara proporsional.

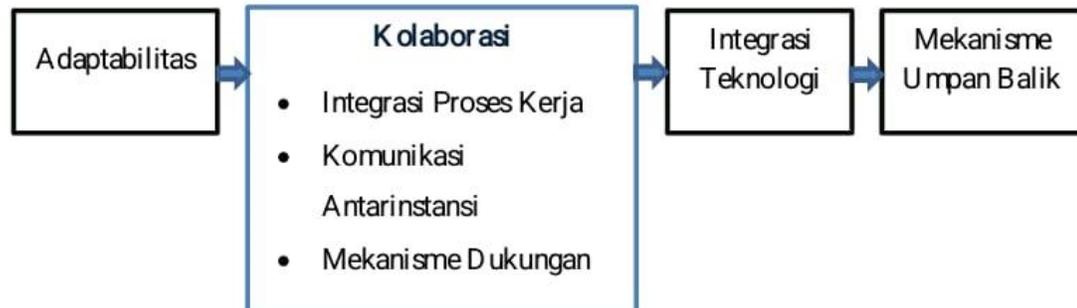
1.5.2.3 Integrasi Teknologi

Integrasi teknologi adalah penerapan dan penggunaan alat dan sistem teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pemerintahan. Melibatkan penggunaan IT untuk mendukung pengelolaan proyek, meningkatkan transparansi, dan mempermudah akses serta interaksi dengan masyarakat. Ini mencakup penerapan sistem digital yang memungkinkan otomatisasi proses, pengolahan data yang lebih cepat, dan komunikasi yang lebih baik antar instansi.

1.5.2.4 Mekanisma Umpan Balik

Mekanisme umpan balik adalah proses di mana informasi mengenai kinerja atau hasil suatu sistem atau proses dikumpulkan, dianalisis, dan digunakan untuk melakukan perbaikan atau penyesuaian. Umpan balik yang efektif memungkinkan pemerintah untuk terus menerus memperbaiki layanan dan kebijakan berdasarkan input dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Ini mencakup pengumpulan data dari pengguna layanan, evaluasi kinerja, dan penyesuaian kebijakan atau proses berdasarkan hasil tersebut untuk meningkatkan kualitas dan relevansi layanan publik (Butler, 2011).

Gambar 1. Indikator Teori Agile Government



Sumber: Teori Agile Government Butler, (2011)

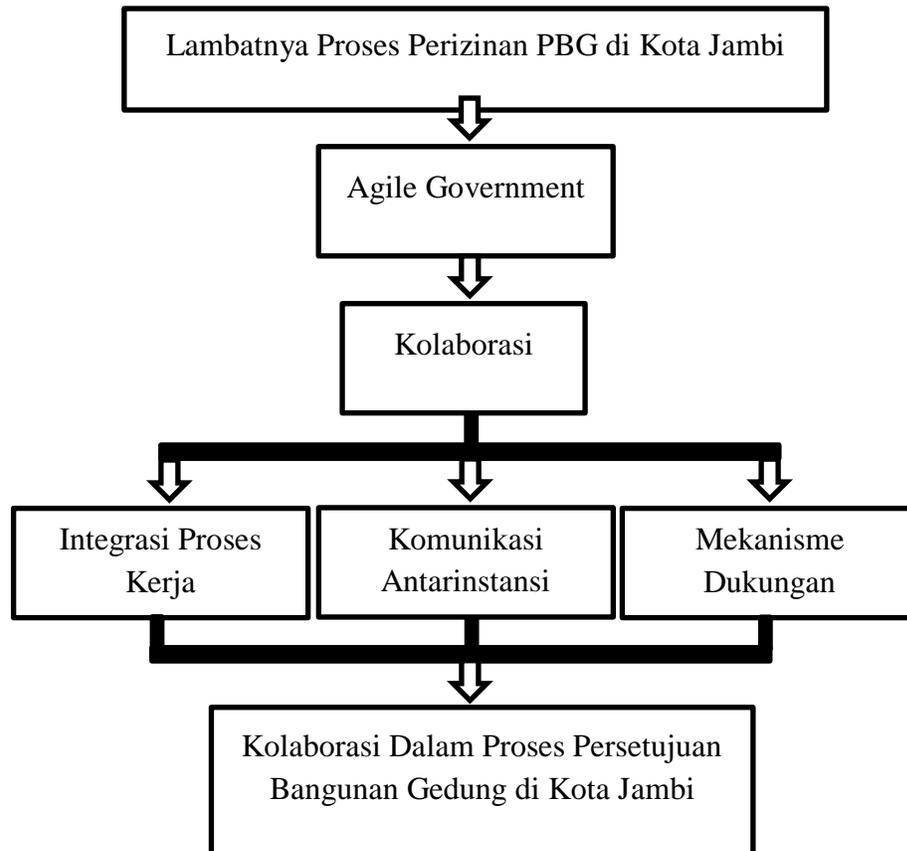
1.5.3 Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Persetujuan Bangunan Gedung merupakan perizinan bangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah guna memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan perizinan bangunan. Dimana PBG merupakan terobosan yang dihadirkan oleh pemerintah untuk menggantikan Izin Mendirikan Bangunan yang dianggap cukup sulit dalam pengurusannya. Dimana di kota jambi pengurusan PBG ditangani oleh dua institusi yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai tim pendamping administratif, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai tim teknis dalam pengurusan izin PBG.

1.6 Kerangka Pikir

Adapun kerangka berfikir yang digunakan oleh peneliti dalam mengkaji Kolaborasi Dalam Proses Persetujuan Bangunan Gedung Di Kota Jambi, sebagai berikut:

Gambar 1. 2Kerangka Penelitian



1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Creswell menjelaskan bahwa penelitian studi kasus adalah suatu metode di mana peneliti mengeksplorasi kehidupan nyata dari satu atau beberapa kasus. Proses ini melibatkan pengumpulan data yang mendalam dan rinci dengan

memanfaatkan berbagai sumber informasi, seperti observasi, wawancara, bahan audiovisual, dan dokumen (John W.Creswell, 2014).

Peneliti memilih metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus karena peneliti ingin mengeksplorasi secara mendalam bagaimana kolaborasi dalam proses persetujuan bangunan gedung di kota jambi berdasarkan teori Buttler. Penelitian ini juga memanfaatkan berbagai sumber data seperti wawancara, analisis dokumen, dan bahan audiovisual sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif tentang masalah yang diteliti.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Peneliti akan melaksanakan penelitian di dua dinas di Kota Jambi yakni:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dimana merupakan pelaksana administratif dalam pengurusan PBG di kota jambi. Jl. H. Zainir Haviz, Paal Lima, Kec. Kota Baru, Kota Jambi.

Gambar 1. 3Lokasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi



Sumber: Google Maps, (2024)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dimana merupakan pelaksana teknis pengurusan izin PBG di kota jambi. Jl. H. Zainir Haviz, Paal Lima, Kec. Kota Baru, Kota Jambi.

Gambar 1. 4 Lokasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi



Sumber: Google Maps, (2024)

Penelitian ini dilakukan di dua dinas terkait dikarenakan peneliti ingin melihat bagaimana Kolaborasi Dalam Proses Persetujuan Bangunan Gedung Di Kota Jambi.

1.7.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah meningkatkan kolaborasi antar instansi dalam proses layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kota Jambi menggunakan teori Kolaborasi. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana metode ini dapat memperbaiki kolaborasi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (DPMPTSP), dengan menekankan pentingnya kolaborasi sebagai indikator utama.

1.7.4 Sumber Data

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui pihak-pihak yang terkait dengan rumusan masalah yang ada. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara serta dari dokumentasi. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan peneliti dari sumber yang sudah tersedia. Dalam hal ini adapun dokumen-dokumen yang akan dikumpulkan oleh peneliti yaitu; Peraturan Pemerintah, Perjanjian Kerjasama, Standar Operasional Prosedur (SOP), Rencana Strategis (RENSTRA), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), dan Laporan Evaluasi Kinerja.

1.7.5 Teknik Penentuan Informan

Informan adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian, karena orang-orang tersebut dibutuhkan informasinya dalam melakukan penelitian.

Penentuan

informan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan keterlibatan seseorang dengan objek penelitian yang akan diteliti, dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*.

Purposive Sampling merupakan teknik atau cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi. Yang mana teknik ini di gunakan untuk merinci kekhususan yang ada dalam rumusan konteks yang unik dan menggali informan yang akan menjadi dasar dari rencangan dan teori yang di gunakan (Moleong, 1990).

Informan berperan sebagai sumber data utama yang mampu memberikan wawasan mendalam tentang objek penelitian. Moleong juga menekankan bahwa validitas informasi yang diberikan oleh informan harus dijamin melalui proses triangulasi data dan verifikasi (Moleong, 1990). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 (dua) teknik yaitu *Purposive Sampling*, adalah teknik di mana anggota sampel dipilih berdasarkan kriteria spesifik yang relevan dengan penelitian (Moleong, 1990).

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian karena tujuannya adalah untuk memperoleh data yang diperlukan. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data yang diterapkan mencakup wawancara, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber, baik itu informan biasa maupun informan kunci, untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Proses wawancara ini melibatkan komunikasi yang intens antara pewawancara dan narasumber, di mana diskusi diarahkan pada eksplorasi detail dan aspek-aspek yang spesifik dari topik yang dibahas (Rully Indrawan, 2017). Wawancara yang diterapkan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Menurut penjelasan Sugiyono dalam bukunya, wawancara semi terstruktur memungkinkan responden memberikan jawaban yang lebih leluasa tanpa batasan yang ketat, namun tetap harus sesuai dengan tema yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013). Berikut daftar informan yang akan di wawancarai oleh peneliti.

Tabel 1. 3 Daftar Informan Penelitian

No.	Informan	Keterangan
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Jambi	Sebagai pihak yang bertanggung jawab secara langsung atas kolaborasi dalam proses pengurusan pbg di kota jambi, selaku dinas teknis.
2.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi	Sebagai pihak yang bertanggung jawab secara langsung atas kolaborasi dalam proses pengurusan pbg di kota

		jambi, selaku dinas administratif.
--	--	------------------------------------

2. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui studi dokumentasi adalah usaha untuk mendapatkan data dan informasi berupa catatan tertulis atau gambar yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti. Dokumen merupakan fakta dan data yang tersimpan dalam berbagai bentuk dokumentasi (Rully Indrawan, 2017). Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan berupa foto saat wawancara dan catatan kegiatan yang dilakukan peneliti di lapangan.

1.7.7 Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan dalam buku yang dikutip oleh Sugiyono, analisis data merupakan suatu proses yang sistematis dalam mengelola serta menyusun informasi yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan berbagai sumber lainnya. Tujuan dari proses ini adalah agar data menjadi lebih mudah dipahami serta dapat dikomunikasikan kepada pihak lain. Tahapan dalam analisis data mencakup pengorganisasian informasi, pemecahan data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, sintesis informasi, identifikasi pola, pemilihan aspek yang relevan, serta penyusunan kesimpulan yang dapat disampaikan secara jelas (Sugiyono, 2013).

Dalam penelitian ini, teknik analisis data lapangan diterapkan dengan pendekatan yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Pendekatan ini menekankan bahwa proses analisis data dimulai secara bersamaan dengan pelaksanaan wawancara, di mana peneliti melakukan penilaian serta evaluasi langsung terhadap jawaban yang diberikan oleh responden. Jika dalam analisis awal ditemukan bahwa jawaban tersebut belum cukup memadai, maka peneliti akan melanjutkan dengan pertanyaan tambahan hingga diperoleh informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Analisis data kualitatif dilakukan secara berkelanjutan dan interaktif, berlangsung secara terus-menerus hingga data yang dikumpulkan dianggap cukup serta tidak lagi menghasilkan temuan baru.

Tahapan

Teknik *Flow Chart Analysis* Analisis data ini menggunakan model "analisis data mengalir" yang dikembangkan oleh Huberman dan Miles (1992), sebuah metode yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif. Model ini mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses sistematis dalam penelitian yang melibatkan aktivitas mengamati, mencatat, mendokumentasikan, dan mengorganisasi informasi yang relevan dengan topik penelitian. Pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat

dan mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti, serta digunakan untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan penelitian secara menyeluruh.

b. Reduksi Data

Tahap ini melibatkan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, peng abstraksi-an, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Reduksi data bukan hanya sekadar mengurangi jumlah data, tetapi juga merupakan bagian dari analisis untuk mengidentifikasi data yang relevan dan mengorganisasikannya dengan lebih terfokus. Tujuannya adalah untuk membuat data lebih mudah dianalisis dan memfasilitasi pembuatan kesimpulan akhir.

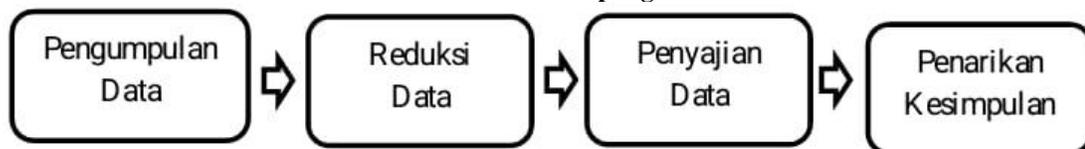
c. Penyajian Data

Langkah ini bertujuan untuk menyusun data secara sistematis sehingga memudahkan dalam memahami dan menarik kesimpulan. Penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk teks naratif, tetapi juga dapat berupa matriks, grafik, atau tabel. Penyajian ini membantu peneliti mengidentifikasi pola dan hubungan dalam data yang berkaitan dengan fokus penelitian.

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap ini melibatkan pembuatan kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis. Kesimpulan dapat bersifat sementara selama proses pengumpulan data dan kemudian diverifikasi atau disempurnakan hingga menjadi kesimpulan akhir setelah seluruh data dianalisis. Pada tahap ini, peneliti mencari pola, keteraturan, hubungan sebab-akibat, atau penjelasan yang muncul dari data (Huberman & Miles, 1992). Secara keseluruhan, model analisis data ini bersifat interaktif dan dilakukan secara berkesinambungan selama proses penelitian, memungkinkan peneliti untuk terus menginterpretasikan dan memverifikasi temuan mereka secara dinamis.

Gambar 1. 5 Teknik Analisis Data Lapangan Miles dan Huberman



Sumber: Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Sugiyono, (2013)

1.7.8 Keabsahan Data

Pada dasarnya, triangulasi adalah serangkaian upaya untuk memvalidasi data atau informasi yang diperoleh oleh peneliti. Seperti yang dijelaskan oleh (Samsu. S, 2021), tujuan utama dari triangulasi data bukanlah untuk menemukan kebenaran mutlak tentang suatu fenomena, melainkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap temuan yang diperoleh.

a. Triangulasi Sumber

Memeriksa derajat kebenaran data didasarkan pada berbagai sumber. Sebagai contoh, wawancara dilakukan dengan sumber A, B, dan C; jika ditemukan kecocokan antara data yang diperoleh dari masing-masing sumber tersebut, maka data tersebut dapat dianggap benar. Dalam praktiknya, informan yang dipilih untuk wawancara kemudian dibandingkan datanya untuk memastikan validitas dan konsistensi informasi yang diperoleh (Samsu. S, 2021).